

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang tertera pada bab-bab sebelumnya, dengan pokok pembahasan mengenai Pemanfaatan BMD pada BKD Kota Depok, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan yang merupakan dayaguna BMD yang tidak dipergunakan sebagai penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- b. Penggunaan BMD ialah pinjam pakai, sewa, BGS/BSG, kerja sama pemanfaatan atau kerja sma penyediaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kota Depok
- c. Penggunaan Barang Milik Daerah dikerjakan oleh pengelola barang milik daerah melalui konvensi walikota. Kepemilikan daerah dikendalikan oleh pengelola barang dan pengguna barang. Pengelola barang menyetujui bahwa sebagian dari tanah atau bngunan tersebut asih digunakan oleh pengguna properti, bukan tanah atau bangunan.
- d. Selama masa pemanfaatan biaya pemeliharaan serta pengamanan BMD yang menjadi objek pemanfaatan, dan dibebankan pada mitra pemanfaatn serta biaya persiapan pemanfaatan BMD dibebankan pada APBD.
- e. Proses pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan (BKD) Kota Depok berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016, tentang “Pedoman Pengelolaan BMD”.

5.2 Saran

Bahwa pinjam pakai dilaksanakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan daerah agar terlaksana tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah diperlukan adanya komunikasi intensif antara Pemerintah Kota Depok dengan pihak peminjam pakai sehingga tidak terjadi keterlambatan perpanjangan pinjam pakai yang mengakibatkan akan menjadi temuan oleh BPK karena pinjam pakai merupakan salah satu objek pemeriksaan BPK.

Sewa menyewa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Depok. Intensifikasi diperlukan peninjauan ulang Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan untuk Ekstensifikasi perlu didata ulang Barang Milik Daerah mana yang sudah tidak digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga bisa dimanfaatkan pihak lain, besaran tarif sewa juga sebaiknya dinaikkan agar bisa menunjang dan menambah Pendapatan Asli Daerah.